

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Siagian,1985).

Pembangunan yang baik dan merata dapat meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitasnya. Umumnya tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Suparmoko, 1992). Selain itu, bagian integral dari pembangunan nasional ialah pembangunan daerah yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyasikan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan

potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Bila ada perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah masing-masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan nasional tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah. Keberadaan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah berkaitan dengan masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian diubah untuk ketiga kalinya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi.

Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal itu sendiri yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. Selain itu juga harus didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan gambaran tingkat kemandirian daerah, semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Penerimaan dana bagi pemerintah daerah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan-urusan pemerintahan daerah yang didanai oleh salah satu jenis dana perimbangan yaitu dana alokasi umum ialah diantaranya urusan pemerintahan konkuren baik itu urusan wajib maupun pilihan seperti urusan di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanahan, dan urusan-urusan lainnya yang diserahkan ke daerah, dimana urusan-urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dana perimbangan yang terdiri dari bagian daerah penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Berikut adalah contoh tabel yang menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota/kabupaten se-karesidenan Surakarta:

Tabel 1-1  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota / Kabupaten Se-Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)

No.	Kota / Kab.	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Surakarta	181.096.816	231.672.100	298.400.847	335.660.207	341.533.937
2.	Boyolali	96.489.134	127.725.207	160.752.450	227.516.496	221.873.999
3.	Klaten	72.293.790	84.756.022	115.454.162	177.923.444	156.097.966
4.	Wonogiri	77.141.691	100.037.192	111.592.606	182.149.063	174.557.497
5.	Sukoharjo	96.166.807	164.954.319	192.971.720	264.814.414	235.933.524
6.	Sragen	94.518.999	127.695.844	146.721.550	254.392.450	195.290.956
7.	Karanganyar	104.080.774	116.706.893	161.724.334	215.298.860	181.061.011

Sumber: BPS Jawa Tengah 2014 - 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2015 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota/kabupaten se-karesidenan Surakarta terus mengalami peningkatan di Kota Surakarta, tetapi tidak dengan kota lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2015 sedangkan tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari peranan beberapa faktor yang ikut menentukan naik dan turunnya nilai penerimaan PAD.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015.

**B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Surakarta tahun 2011-2015.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pemerintah daerah karesidenan Surakarta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gagasan, guna memperbaiki sistem pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah karesidenan Surakarta.

2. Bagi badan perencanaan daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan pembangunan daerah yang akan dilakukan pemerintah daerah di wilayah karesidenan Surakarta, guna meningkatkan dan pengembangan pembangunan daerah.
3. Bagi dinas pendapatan daerah, sebagai bahan masukan dan acuan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah di wilayah karesidenan Surakarta.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian berikutnya yang terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di wilayah karesidenan Surakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna menganalisis pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) se-karesidenan Surakarta, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*), yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada titik waktu tertentu. Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2012) :

1. Metode *Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square* atau *PLS*)

$$PADK_{it} = \beta_0 + \beta_1 POP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 G_{it} + u_{it}$$

Dimana :

$PAD_{it}$  : Pendapatan Asli Daerah untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$POP_{it}$  : Jumlah Penduduk untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$PDRB_{it}$  : Produk Domestik Regional Bruto untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

$G_{it}$  : Pengeluaran Pemerintah untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t

i : Menunjukkan Kota/Kabupaten.

t : Menunjukkan deret waktu 2011-2015

$\beta_{0,1,2,3}$  : Koefisien intersep dan slope

u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

## 2. Metode *Fixed Effect* (*Fixed Effect Model* atau *FEM*)

Model regresi FEM adalah sebagai berikut :

$$PADK_{it} = \beta_0 + \beta_1 POP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 G_{it} + \beta_4 d_{1i} + \beta_5 d_{2i} + \beta_6 d_{3i} + \beta_7 d_{4i} + \beta_8 d_{5i} + \beta_9 d_{6i} + \beta_{10} d_{7i} + v_{it}$$

## 3. Metode *Random Effect* (*Random Effect Model* atau *REM*)

Model regresi REM adalah sebagai berikut :

$$PADK_{it} = \beta_0 + \beta_1 POP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 G_{it} + \omega_{it}$$

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau REM yang paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan antara lain :

### a. Uji Chow

Hipotesis dalam uji *chow-test/likelihood ratio test*, yaitu :

$H_0$  : model mengikuti *Common/Pooled*

$H_a$  : model mengikuti *Fixed Effect*

b. Uji Hausman

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

$H_0$  : model mengikuti *Random Effect*

$H_a$  : model mengikuti *Fixed Effect*

Setelah diperoleh metode terbaik, selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis, yang meliputi :

a. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

b. Uji Statistik F

c. Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square* ( $R^2$ )